

**KEKERASAN KULTURAL TERHADAP ETNIS UYGHUR TIONGKOK**

**PADA TAHUN 2014 - 2021**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**HELFINA YUSUF**

**15323022**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**KEKERASAN KULTURAL TERHADAP ETNIS UYGHUR TIONGKOK  
PADA TAHUN 2014 – 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**HELEINA YUSUF**

**15323022**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014 – 2021**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

14 Oktober 2021

Mengesahkan

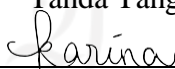


Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi

  
Hangga Fathana, S.IP., B. Int. St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
- 3 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Helfina Yusuf

No. Mahasiswa : 15323022

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok  
Pada Tahun 2014-2021

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dan bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran yang bertentangan dengan etika yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021



Helfina Yusuf

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Untuk ayah dan ibu tercinta yang telah mengiringi dengan doa dan kasih sayang.

Selamat ulang tahun pernikahan orang tuaku, tercinta.



## HALAMAN MOTTO

“Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

**(QS. Yusuf: 111)**

“The trick is to write something simple that's still interesting and at the same time unique”

**(Karl Martin Sandberg)**

الجمعة المباركة  
الاستاذ الاندوني

## KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis berhutang pada banyak pihak yang berhadapan serta memberikan energi, bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual. Tak semua bisa disebutkan satu per satu. Perkenankan penulis mengungkapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Karina Utami Dewi S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi atas ilmu, pengalaman dan motivasinya yang berharga serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam perkuliahan sampai penulisan skripsi. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekeliruan selama melakukan bimbingan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Ibu selalu dimudahkan rezeki dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bapak Enggar Furi Herdianto S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional dan dosen, kemudian untuk dosen-dosen HI khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Irawan Jati, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Bapak Hasbi Aswar., S.IP., M.A., Ph.D., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan serta seluruh dosen-dosen UII. Terima kasih atas ilmu, arahan dan kesabarannya. Tidak lupa pula kepada Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat selama menempuh masa studi.
5. Seluruh tenaga administrasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua, Yusuf Saleh dan Zaimaniarti Zainuddin selaku pembimbing kehidupan yang senantiasa mengingatkan dan memberikan semangat secara moril maupun materiil dalam berbagai keadaan sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan studi.
7. Adik tercinta, Mirna Yusuf yang selama ini menemani, memberi semangat, memotivasi dan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk.
8. Kedua orang tua, Ibu dan Apak Nur Prayitno, Sarah dan Ririn yang menemani dan mendukung selama beradaptasi di Yogyakarta.
9. Almarhum Rayyan Ashbahani yang terbiasa memihak dan memberikan pengajaran tentang memaknai waktu yang seolah - olah mengembang pada penulis.
10. Teman tersayang yang diawali dari Mita, Ummu, Sophee, Sarah dan Ova serta yang senantiasa selalu menyemangati, menasehati, menemani, dan



menghibur penulis selama ini.

11. Teman perjalanan Ami, Tami, Fadly, Irma, Anty, Meta, Kak Idez yang sabar melangkah dan melewati rintangan bersama.
12. Teman kuliah prodi Hubungan Internasional angkatan 2015 yang terlibat secara formal dan informal atas segala dukungan yang telah diberikan.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu jalannya penelitian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap tulisan ini. Meski terdapat kekurangan, penulis berharap semoga temuan ini dapat memberikan secuil kontribusi dalam studi Hubungan Internasional dan dalam bidang-bidang terkait. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Oktober 2021

Helfina Yusuf

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Signifikansi .....	4
1.5 Cakupan Penelitian .....	5
1.6 Tinjauan Pustaka .....	6
1.7 Landasan Konseptual .....	9
1.8 Metode Penelitian .....	14
1.8.1 Jenis Penelitian .....	14
1.8.2 Subyek Penelitian .....	14
1.8.3 Teknik Pengambilan Data .....	14
1.8.4 Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II</b> .....	16
<b>ANALISIS BENTUK KEKERASAN KULTURAL DALAM ASPEK IDEOLOGI &amp; BAHASA TERHADAP ETNIS UYGHUR</b> .....	16
2.1. Perkembangan Keberadaan Etnis Uyghur di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) .....	17
2.2 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Ideologi .....	19
2.3 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Bahasa .....	22
<b>BAB III</b> .....	27

<b>KEKERASAN KULTURAL DALAM ASPEK SENI, ILMU FORMAL DAN KOSMOLOGI SERTA ANALISIS SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP ETNIS UYGHUR.....</b>	<b>27</b>
3.1 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Seni .....	27
3.2 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Ilmu Formal.....	32
3.3 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Kosmologi .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Rekomendasi.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2 Temuan Hasil dari Kasus Kekerasan Kultural terhadap Etnis .....	39
-------------------------------------------------------------------------	----



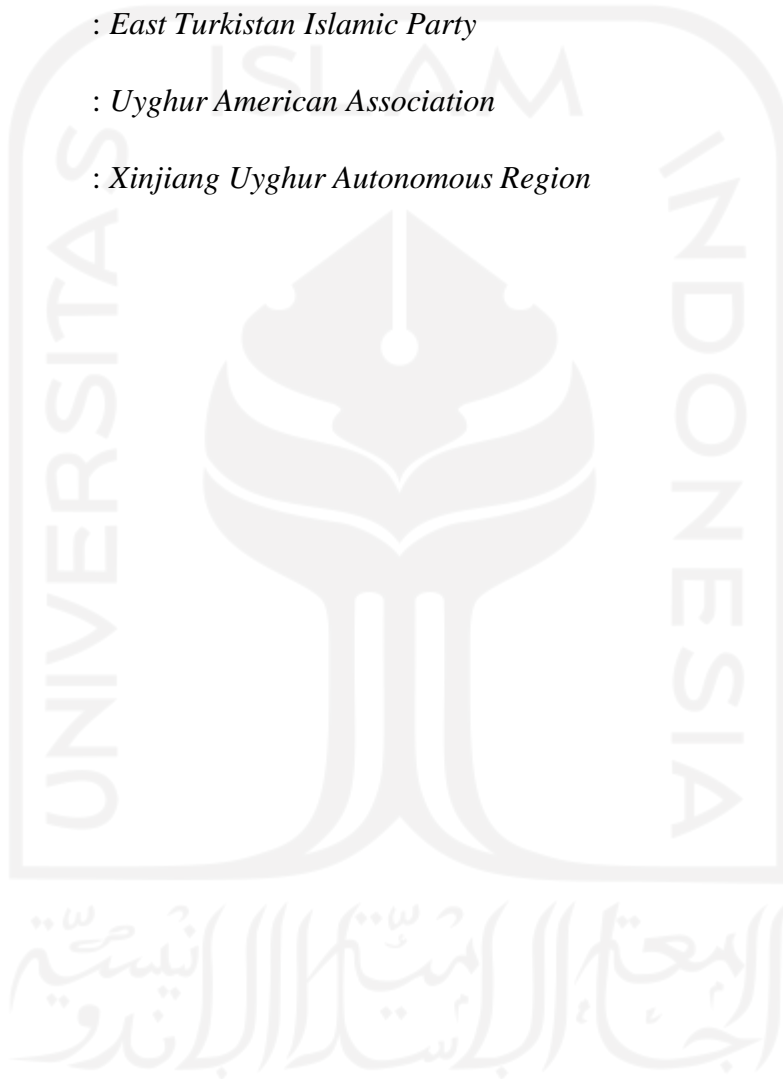
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Segitiga Kekerasan Galtung (Galtung, 1990, hal.294) ..... 11



## DAFTAR SINGKATAN

- BRI : *Belt and Road Initiative*
- CPC : *Chinese Communist Party*
- ETIP : *East Turkistan Islamic Party*
- UAA : *Uyghur American Association*
- XUAR : *Xinjiang Uyghur Autonomous Region*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejarah mencatat bahwa upaya penegakan HAM telah berlangsung berabad-abad lalu, walaupun secara eksplisit tidak semua negara berhasil menerapkan dengan baik, hal ini bisa diukur dari banyaknya kasus HAM di setiap negara sehingga menjadikan masalah HAM lebih sering dibahas dan dibicarakan (Ceswara & Puji, 2018, p. 5). Berikut kasus pelanggaran HAM pada kelompok-kelompok minoritas atau masalah etnis yang menjadi sasaran dari tindak kekerasan seperti konflik etnis Kurdi di Timur Tengah yang dilakukan oleh negara dan kelompok pemberontak bersenjata dengan korban puluhan ribu orang. Turki telah berperang dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK sejak awal tahun 1980-an. Orang Kurdi merupakan kelompok etnis minoritas yang berbeda dan sering terpinggirkan. Konflik Kurdi penuh dengan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat (Mousseau, 2019, p. 1).

Dibandingkan dengan krisis tersebut, saat ini masalah etnis Uyghur di Tiongkok kembali menjadi sorotan utama setelah banyaknya data terbongkar di publik beberapa waktu lalu. Seperti tindakan pemerintah Tiongkok dalam TV nasionalnya membantah negaranya melakukan hal tersebut. Dalam kasus serupa pemerintah Tiongkok pernah membatalkan siaran langsung pertandingan salah satu klub sepak bola Inggris karena menyangkut salah satu pemain yang

mengangkat masalah etnis ini di sosial media. Namun Pemerintah Tiongkok mengatakan ini adalah berita palsu dan tidak beralasan, Melalui pembelaan ini memicu perdebatan panjang dan kesadaran masyarakat global dalam melihat kondisi etnis Uyghur yang sebenarnya dan menyatakan masalah ini sebagai salah satu korban krisis pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (Bequelin, 2019).

Penolakan Pemerintah Tiongkok untuk mengubah kebijakan dalam menggabungkan kelompok minoritas sebagai bagian dari identitas nasional dikarenakan tertekan oleh adanya kelompok etnis minoritas. Hal ini terlihat dari sejumlah serangan kekerasan yang mengerikan seperti penikaman pada 2014 di Kunming dan tahun 2013 insiden Lapangan Tiananmen. Kondisi tersebut makin memperburuk hubungan pemerintah dengan kelompok minoritas etnis (Tibet dan Uyghur). Kelompok separatis dipandang sebagai ancaman dari pihak eksternal yang mengganggu kestabilan domestik dan merugikan keamanan nasional. Walaupun pemerintah Tiongkok menerima tekanan dari kelompok Hak Asasi Manusia dan media Internasional akan tetapi kebijakan pemerintah Tiongkok dalam isu etnis minoritas tidak mengalami perubahan (Jing, 2106).

Dilain sisi banyak pemerintah negara lain termasuk Amerika yang menyatakan bahwa kamp yang dibentuk oleh Tiongkok untuk masyarakat Ugyhur melanggar HAM karena terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan lainnya namun pemerintah Tiongkok membantah dan mengatakan ini adalah kamp untuk pendidikan masyarakat Tiongkok untuk terhindar dari ekstrimis namun banyak pemerintah tetap percaya bahwa ini adalah program indogtrinasi psikologis seperti mempelajari propaganda komunis (Kirby, 2018).



Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang semakin sulit terbantahkan, hal ini dibuktikan dengan penderitaan satu-tiga juta etnis Uyghur yang dirasa mendapatkan diskriminasi sebagai kelompok etnis minoritas. Kebijakan membeda-bedakan kelompok etnis merupakan bagian dari aspek simbolis dari kekerasan kultural. Dari kasus Hak Asasi Manusia ini Tiongkok mendapatkan tekanan internasional setelah pelanggaran etnis Uyghur dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengerikan dibuktikan dengan adanya 22 negara di PBB yang ikut menandatangani surat mengkecam seperti Kanada, Jepang, Jerman dll. Hal ini diikuti oleh ungkapan dari *Human Rights Watch UN* (Human Rights Watch, 2019) :

*“Governments are increasingly recognizing the suffering of millions of people in Xinjiang, with families torn apart and living in fear, and a Chinese state that believes it can commit mass violations uncontested,” Fisher said. “The joint statement demonstrates that Beijing is wrong to think it can escape international scrutiny for its abuses in Xinjiang, and the pressure will only increase until these appalling abuses end”*

Kawasan Xinjiang memiliki nilai strategis, ekonomi, dan historis bagi pemerintah Tiongkok. Namun, kenyataannya Xinjiang masih mengalami permasalahan kompleks, hal ini sesuai dengan *White paper* Pemerintah Tiongkok 2019. Kebijakan pemerintah Tiongkok yang represif semakin memperburuk resolusi konflik etnis Uyghur. Penjelasan di atas semakin selaras dengan konsep Johan Galtung terkait kekerasan kultural merupakan tindakan kekerasan dilakukan dengan biasa dalam masyarakat sehingga kekerasan tidak

dinilai sebagai kesalahan atau penekanan bahwa kekerasan kultural dapat membenarkan tindakan kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Galtung J. , 1990, p. 291).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini penulis diarahkan untuk memecahkan masalah pokok yakni Bagaimana Penerapan Konsep Kekerasan Kultural Dalam Menjelaskan Kebijakan Tiongkok Pada Tahun 2014-2021 Terhadap Etnis Uyghur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekerasan yang dialami oleh etnis Uyghur pada tahun 2014-2021.
2. Untuk memetakan segitiga kekerasan dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur pada tahun 2014-2021.

## **1.4 Signifikansi**

Penelitian sebelumnya hanya menganalisis isu tentang Uyghur sebagai etnis minoritas dan konflik di wilayah Xinjiang. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif konsep kekerasan kultural oleh Johan Galtung. Dengan melihat bentuk kekerasan berdasarkan aspek-aspek budaya yang menjadi simbol dalam kekerasan serta melihat bagaimana kekerasan kultural dapat terjadi dalam bentuk kekerasan struktural dan langsung. Pentingnya penelitian ini dapat dilihat dengan kebijakan Xi Jinping yang mendikriminasi

etnis Uyghur dibandingkan etnis muslim lainnya dan seberapa jauh diskriminasi tersebut dalam semua bentuk kekerasan. Konsep ini mampu menjelaskan isu Uyghur terlebih dengan adanya pernyataan PBB yang memperkuat bahwa pemerintah Tiongkok represif terhadap etnis Uyghur secara kultural, struktural, dan langsung.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini mencakup dalam ilmu hubungan internasional dengan tema pembahasan Studi Konflik dan Perdamaian. Adapun cakupan penelitian ini berfokus pada kekerasan kultural terhadap etnis Uyghur pada tahun 2014-2021. Kekerasan terhadap etnis Uyghur telah terjadi sebelum masa kepemimpinan Xi Jinping hingga saat ini. Peneliti membatasi ruang penelitian berkisar pada tahun 2014 sampai 2021. Periode tahun diambil karena pada tahun 2014 otoritas Tiongkok mengeluarkan *strike hard campaign* untuk melawan terorisme yang diikuti larangan dalam melakukan aktivitas keagamaan (Kashgary, 2014). Serta tahun 2021 Tiongkok kembali mengeluarkan dokumen *white paper* yang berfokus pada perlindungan hak-hak kelompok etnis di Xinjiang. Serta pada tahun 2021 sebagian besar dari ketegangan, kekerasan dan kegaduhan etnis Uyghur masih dibicarakan beberapa media dan organisasi internasional yang dilatarbelakangi oleh laporan PBB terhadap pengetatan keamanan etnis Uyghur dan bocornya dokumen-dokumen rahasia kebijakan pemerintah Tiongkok dalam mengendalikan etnis Uyghur.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Konflik kekerasan etnis dan agama minoritas telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam tulisan yang berjudul *Boundaries, discrimination, and interethnic conflict in Xinjiang, China* yang ditulis oleh Enze Han yang membahas terkait rentannya kekerasan hubungan interetnik Uyghur dan Han. Kondisi sosial tersebut mendorong terjadinya kekerasan komunal seperti peminggiran, diskriminasi, dan prasangka. Upaya pemerintah Tiongkok mencegah kembali kekerasan dengan mendukung toleransi etnis Uyghur yang memiliki karakteristik dalam bahasa, agama dan budaya. (Han, 2010, p. 255)

Kedua, dalam tulisan yang berjudul *Uyghur in Xinjiang: a general assessment of the roots of unrest* yang ditulis oleh Vladislav Shchukin yang membahas terkait pemerintah yang membenarkan kebijakan anti-teror untuk menjaga stabilitas domestik melawan tindakan teror. Ketegangan etnis Uyghur tidak didasari dengan kemampuan kelompok terorisme Uyghur yang tidak memiliki landasan tertentu. Ketakutan Tiongkok meningkat ketika kehilangan kontrolnya di wilayah penting, Uyghur. Minoritas etnis Uyghur dipaksa untuk mengikuti konsep nasionalisme Tiongkok dengan menjalankan bahasa, budaya, bekerja dan melarang praktik agama Islam. Klaim kebijakan pemerintah yang gegabah memicu kerusuhan di Xinjiang berikut beberapa kebijakan, pertama penolakan identitas Uyghur dilegitimasi dengan mengabaikan otonomi wilayahnya, kedua tidak terpenuhinya hak-hak politik dan sipil yang diterima

Uyghur dibandingkan dengan Han di Xinjiang menimbulkan kesenjangan sosial (Shchukin, 2009, p. 179).

Ketiga, dalam tulisan yang berjudul *Unrest in Xinjiang, Uyghur Province in China* yang ditulis oleh Raymond Lee, yang membahas terkait bagaimana Tiongkok dapat menyelesaikan konflik Uyghur dengan langkah memberikan akomodasi kepada etnis Uyghur untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penyelesaian konflik dilihat dari sudut pandang jangka pendek yang berasal dari konflik identitas dengan pemerintahan internal Tiongkok. Serta jangka panjang dari kekerasan di Xinjiang dapat meningkatkan masalah sosial dari segala aspek masyarakat yang berujung dengan perpecahan dari berbagai etnis. Beberapa aspek terkait kekerasan Xinjing adalah sebagai berikut: Pertama, Tiongkok merupakan negara dengan dinamika pembangunan yang cepat, hal ini berpengaruh dalam munculnya masalah sosial di Xinjiang dan keamanan nasional. Kedua, konflik di Xinjiang dikaitkan dengan protes kebijakan Tiongkok. Ketiga, adanya kesenjangan ekonomi antara etnis Uyghur dengan etnis Han. Keempat, beberapa tahun terakhir sistem sekolah Islam di Xinjiang memicu lahirnya gerakan sentimen nasionalisme atau kemerdekaan Xinjiang dalam melawan pemerintah Tiongkok yang menerapkan kontrol ketat (Lee, 2014, p. 4).

Keempat, dalam tulisan yang berjudul *Violent resistance in Xinjiang (China): tracking militancy, ethnic riots and 'knife wielding' terrorists (1978-2012)* yang ditulis oleh Pablo Adriano Rodriguez, yang membahas terkait konflik separatisme, terorisme dan pemberontakan etnis telah berlangsung sejak

berdirinya Tiongkok pada tahun 1949. Pada tahun 2012 Tiongkok memprioritaskan alokasi dana keamanan nasional dibandingkan pertanian. Kebijakan ini terealisasi setelah peristiwa serangan etnis Uyghur yang mengakibatkan 10 etnis meninggal dunia di Kashgar sehingga informasi dan data yang mengkaji konflik kekerasan di Xinjiang menjadi terkenal namun minim verifikasi. Identitas Uyghur direpresentasikan sebagai kelompok-kelompok teroris yang mengganggu kedamaian nasional dan dunia (Rodríguez, 2013, p. 143).

Kelima, dalam tulisan yang berjudul *Economic incentives preempt independence movements: a case study of the Xinjiang Uyghur autonomous region in China* yang ditulis oleh Iman Jafarynejad yang membahas terkait tekanan eksternal dan masalah islamisme di Uyghur dapat memperburuk penyebaran gerakan separatis. Kerusuhan dan separatisme tidak akan terjadi bila pemerintah Tiongkok dapat menjaga kepentingan nasional dengan memberikan kemakmuran ekonomi, pemerataan keadilan, dan kebijakan setara bagi masyarakat Uyghur sehingga kelompok ini akan berhenti menuntut kemedekaannya. Namun, pemerintah Tiongkok tidak memperlihatkan tanda-tanda negosiasi dengan entitas Uyghur (Jafarynejad, 2009, p. 86).

Keenam, dalam tulisan yang berjudul *Uighur Foreign Fights: An Underexamined Jihadist Challenge* yang ditulis oleh Collin P. Clarke dan Paul Rexton Kan yang membahas terkait fokus pemberitaan Uyghur bergeser dari kelompok jihad menjadi perlawanan terhadap pemerintah Tiongkok. Pemberontakan modern etnis Uyghur terjadi diawal 2000an ketika pemerintah

Tiongkok mengintimidasi minoritas Uyghur sehingga ketidakpuasan kepada pemerintah meningkat yang menjadi tindakan represif. Peristiwa invansi Amerika Serikat dan sekutunya kepada Afghanistan pada 2001 merupakan sejarah awal pemberitaan kelompok jihad Uyghur di media global. ETIM (*East Turkestan Islamic Movement*) adalah gerakan yang bertanggung jawab atas meningkatkan penindasan etnis Uyghur. Pada mulanya gerakan ini hanya kelompok islam separatis yang beralih menjadi kelompok militan setelah bergabung dengan Al Qaeda dan Taliban. ETIM membagi wilayah Xinjiang, Tiongkok dan menggabungkan dengan wilayah di Asia Tengah. (Kan, 2017, p. 3).

Literatur-literatur di atas memiliki fokus-fokus pembahasannya tersendiri, diantaranya adalah latarbelakang konflik etnis Uyghur, kasus kekerasan yang terjadi di Tiongkok dan kekerasan kultural di Xinjiang. Berdasarkan literatur yang penulis uraikan di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas kekerasan kultural terhadap etnis Uyghur Tiongkok pada tahun 2014-2021. Oleh sebab itu, skripsi ini akan berkontribusi dalam ilmu hubungan internasional yang akan menyoroti kebijakan pemerintah Tiongkok dalam isu etnis Uyghur menggunakan aspek konsep kekerasan kultural.

## **1.7 Landasan Konseptual**

### **Konsep Kekerasan Kultural**

Analisis dari penelitian ini membutuhkan konsep pemikiran Johan Galtung pada tulisannya yang berjudul *Cultural Violence* pada *Journal of Peace Research* 1990. Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis akan

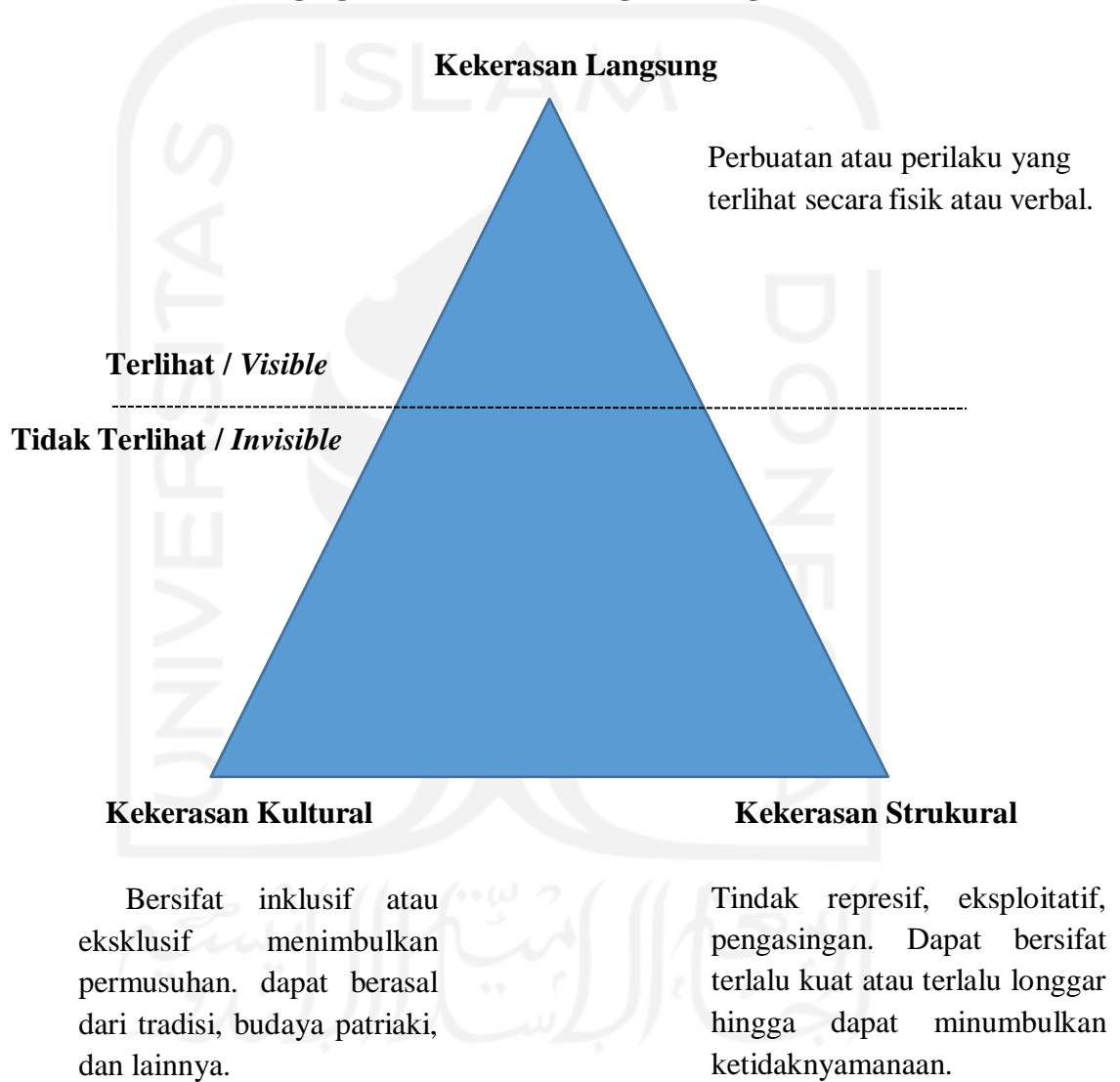
berfokus pada konsep kekerasan kultural. Budaya atau kultural dalam pandangan Galtung bukanlah kebudayaan secara umum melainkan hanya aspek-aspek dalam budaya. Konsep-konsep simbolis budaya dalam masyarakat yakni: agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu formal dan kosmologi yang dapat diterapkan dalam membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan kultural merupakan tindakan kekerasan dilakukan dengan biasa dalam masyarakat sehingga kekerasan tidak dinilai sebagai kesalahan atau penekanan bahwa kekerasan kultural dapat membenarkan tindakan kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Berdasarkan pandangan Johan Galtung salah satu penyebab adanya kekerasan kultural dengan mengganti warna atau pola dalam suatu tindakan dari poin yang salah atau merah menjadi poin yang benar atau hijau. Selanjutnya dengan cara menyembunyikan suatu fakta yang sebenarnya sehingga tindak kekerasan tersebut dapat diabaikan atau tidak terlihat. Tindak kekerasan kultural tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu adanya kontrol dari kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung dapat dibagi dalam empat tipe turunan. Tipe pertama, kejahatan yang merugikan masyarakat seperti pembunuhan, menghilangnya nyawa orang lain, melukai termasuk ancaman bagi kelangsungan hidup. Tipe kedua, penderitaan yang dimulai keterbatasan, lunturnya kebebasan dan kesejahteraan yang ditandai dari aksi sanksi serta pemboikotan. Tipe ketiga, pengasingan serta doktrin dalam masyarakat seperti halangan dalam praktik berbahasa. Tipe keempat, penahanan dalam penjara dan pengusiran, hilangnya hak warga untuk tinggal atau dideportasi oleh negara.



(Galtung J. , 1990, p. 296). Galtung menjelaskan bagaimana korelasi dari kekerasan kultural, struktural dan langsung ke dalam bentuk segitiga.

**Gambar 1.1 Segitiga Kekerasan Galtung (Galtung, 1990, hal.294)**



Konsep kekerasan kultural ini digambarkan dengan hubungan ketiga kekerasan tersebut sebagai segitiga kekerasan dalam suatu strata atau tingkat kekerasannya. Pada gambar di atas, segitiga kekerasan tersebut dilihat bagian

dari kekerasan langsung lebih *visible* (terlihat) sedangkan kekerasan kultural dan kekerasan struktural dilihat lebih *invisible* (tidak terlihat). Menurut Johan Galtung dalam segitiga kekerasan pada gambar diatas, kekerasan langsung diartikan sebagai peristiwa, kekerasan kultural sebagai suatu hal yang tetap atau *invariant* dan kekerasan struktural diartikan dalam proses dari pasang surut. Kekerasan langsung bisa terlihat secara nyata, kekerasan struktural melukai kebutuhan yang dimiliki manusia, tetapi pelakunya tidak langsung untuk diminta tanggung jawabnya dan kekerasan kultural merupakan legitimasi atas kekerasan struktural dan kekerasan langsung secara budaya (Galtung J. , 1990, hal. 291 -305).

Dalam lingkungan bermasyarakat peran kekerasan kultural yang bersifat permanen dapat bertukar-tukar peran dengan kekerasan langsung dan kekerasan struktural tergantung dari aktornya. Dilihat dari sifat kekerasannya, kekerasan kultural dan kekerasan struktural termasuk dalam bagian yang tidak terlihat sedangkan kekerasan langsung bisa terlihat. Bagi Galtung kekerasan langsung adalah keadaan yang dapat terlihat secara fisik, kekerasan struktural adalah pola yang berubah-ubah, dan kekerasan kultural adalah kedudukan yang permanen. Ketika kekerasan kultural dan struktural menempatkan stereotip sosial, budaya, politik yang terlanjut melekat dan terbiasa untuk dilakukan. Perlakuan yang berbeda tersebut akan meningkatkan tindakan yang kurang menyenangkan sehingga tak sedikit orang menggunakan kekerasan langsung sebagai pilihan akhir dalam proses penyelesaian masalah.

Melalui konsep yang telah dipaparkan di atas, penulis melihat bagaimana bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dialami oleh etnis Uyghur, dengan mengaplikasikan enam aspek-aspek budaya dalam masyarakat yakni agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu formal dan kosmologi. Pertama, ideologi yakni ketika negara memiliki hak otoritas tunggal dalam mengendalikan masyarakat atau perpanjangan tangan tuhan. Kedua, bahasa digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Ketiga, seni sebagai objek kekerasan yang dapat menggambarkan subjek dalam kelompok negatif. Keempat ilmu formal sebagai penarikan kesimpulan yang rasional, yang tidak membutuhkan hipotesis atau belum dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bersifat dugaan dari suatu aktor yang menjadi dorongan dalam pengambilan keputusan yang tentunya tidak berakhir dengan persamaan yang sama dengan tempat yang berbeda. Kelima kosmologi yang berdasarkan penarikan penelitian dan observasi sehingga menghasilkan fakta yang dapat ditelusuri kebenarannya karena telah melewati sistematis penelitian. (Galtung J. , 1990).

Johan Galtung menjelaskan bahwa sebuah simbolis dalam kebudayaan dapat membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural terhadap etnis Uyghur. Dalam analisa ini penulis melihat bagaimana implementasi kekerasan kultural terhadap etnis Uyghur hanya dapat dijelaskan dengan mengaplikasikan lima aspek yakni: ideologi, bahasa, seni, ilmu formal dan kosmologi. Seperti minoritas etnis Uyghur dipaksa untuk mengikuti konsentrasi militer dan bersumpah setia pada Partai Komunis Tiongkok termasuk dalam kategori ideologi, belajar dengan aturan pendidikan Tiongkok

termasuk dalam kategori bahasa, menyanyikan lagu Tiongkok termasuk dalam kategori seni, atas praduga bahwa seluruh masyarakat Uyghur terlibat dengan paham radikalisme termasuk dalam kategori ilmu formal dan kosmologi. Sedangkan kategori kosmologi tidak dikaji dalam penelitian ini karena penyimpulan pemerintah Tiongkok dalam pernyataan ilmu formal tidak didukung dengan pengamatan secara mendalam (Osborne, 2018).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam menjawab berbagai permasalahan yang telah dipaparkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan yang mengandalkan observasi dan wawancara dalam proses pengumpulan datanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis pendekatan deskriptif. Biasanya penelitian ini diterapkan dalam kajian ilmu-ilmu sosial seperti, hubungan internasional, ilmu politik dan antropologi (Bakry, 2015).

### **1.8.2 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan budaya yang dialami oleh etnis Uyghur pada tahun 2014-2021.

### **1.8.3 Teknik Pengambilan Data**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengambilan data sekunder. Dengan melihat hasil penelitian sebelumnya dan buku, jurnal, media berita online, dokumen dari website yang relevan dengan topik pembahasan ini.

#### **1.8.4 Sistematika Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam empat bab yang terperinci. Pertama, dalam bab 1 penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan. Kemudian dalam bab 1 penulis akan memberikan sedikit gambaran etnis Uyghur beserta konsep kekerasan kultural. Kemudian pada bab 2 penulis akan menjelaskan analisis bentuk kekerasan kultural dalam aspek agama, ideologi, dan bahasa. Selanjutnya pada bab 3 penulis akan memaparkan kekerasan kultural dalam aspek seni dan ilmu formal serta analisis segitiga kekerasan terhadap etnis Uyghur.



## **BAB II**

### **ANALISIS BENTUK KEKERASAN KULTURAL DALAM ASPEK IDEOLOGI & BAHASA TERHADAP ETNIS UYGHUR**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan analisis etnis Uyghur di Xinjiang, Tiongkok yang termasuk dalam kategori kekerasan kultural dilihat dari aspek ideologi dan bahasa. Berbicara tentang kekerasan, dalam banyak keadaan yang terjadi di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Penulis memerlukan rujukan dari pemikiran Johan Galtung tentang konsep kekerasan. Johan Galtung adalah tokoh dalam abad ini yang berkontribusi penting pada topik perdamaian dan kekerasan melalui berbagai tulisannya. Galtung menyederhanakan kekerasan menjadi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural sehingga dapat mengenali sumber kekerasan beserta menemukan solusi lebih lengkap. Definisi kekerasan Galtung dapat dirumuskan sebagai, setiap kondisi ketika manusia berada di bawah pengaruh orang lain sehingga berdampak pada fisik dan mental (Galtung J. , 1969, hal. 168). Sementara konsep kekerasan kultural, yang merupakan bagian dari segitiga kekerasan, kekerasan kultural ini dapat mewujudkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural tampak benar atau tidak salah. Karena bersifat tidak jelas maka kekerasan kultural sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di mana antara pelaku dan korban kekerasan tidak menyadari berlangsungnya kekerasan tersebut (Galtung J. , 1990, hal. 294).

## **2.1. Perkembangan Keberadaan Etnis Uyghur di Xinjiang, Republik**

### **Rakyat Tiongkok (RRT)**

Xinjiang adalah provinsi yang memiliki pemerintahan dan daerah otonomi sendiri, mereka berada dalam pengawasan ketat otoritas pemerintahan Tiongkok seperti halnya orang Tibet. Xinjiang berbatasan dengan delapan negara Mongolia, Rusia, India, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Uyghur merupakan salah satu etnis minoritas di RRT yang bermukim di wilayah Xinjiang, dimana penduduknya berbicara dengan bahasa mereka sendiri, Turki yang telah dimodifikasi. Bahasa etnis Uyghur mirip dengan Uzbekistan, dalam kehidupan sehari-hari mereka berbicara menggunakan bahasa Turki serta menulis dengan aksara Arab. Secara sejarah, budaya, dan bahasa etnis Uyghur mendapatkan pembagian budaya dari Asia Tengah daripada etnis Han. Populasi terbesar mereka berada di daerah Xinjiang,. Uyghur adalah salah satu etnis minoritas dari 55 kelompok etnis yang berlaku di Tiongkok termasuk Hui, Kazakh, Uzbek, Tajik, dan Kyrgyz. Identitas mereka yang berbeda secara sepenuhnya dari Tiongkok dapat dilihat dari aspek budaya, ideologi, agama, dan politik (Mahmut, 2019).

Uyghur memiliki sejarah panjang yang kompleks dilihat pada tahun 1884, pembentukan Xinjiang atau Wilayah Baru sebagai provinsi dengan menjadikan Liu Jintang sebagai Gubernur pertama. Lalu pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok (PKT) berhasil mengontrol kendali di Xinjiang. Selanjutnya pada Oktober 1955, secara resmi didirikan Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) dengan menempatkan Uyghur sebagai suku bangsa yang diakui. Kemudian pada

tahun 1990-an pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menekankan pengembangan wilayah Xinjiang sebagai bagian program ekonomi yang dilatar belakangi kondisi geografis sehingga memicu perkembangan ekspor Tiongkok (Milliward, 2007, hal. 243).

Selanjutnya insiden kelompok separatis di Baren pada April tahun 1990 dengan penaklukan gedung pemerintahan setempat dan berakhir dengan penangkapan mereka oleh militer. Eastern Turkistan Islamic Party (ETIP) merupakan kelompok yang berada pada insiden tersebut dengan misi kemerdekaan dari Tiongkok. Lalu pada 1997 yang bermula dari protes Ghulja dan serangan pemboman bus Urumqi yang dilakukan kelompok separatis (Milliward, 2007, hal. 331).

Sejak 1949, Republik Rakyat Tiongkok melalui Partai Komunis China (PKC) telah menginvasi wilayah Xinjiang. Pada tahun 1955, Mao Zedong melegalkan Xinjiang menjadi *Uyghur Autonomous Region*, yang berarti pemerintah Tiongkok mengakui identitas Uyghur dan mengizinkan mereka menggunakan otonomi tertentu (Castets, 2003). Sejak Xi Jinping menjabat sebagai presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 2013 wilayah Xinjiang menerima perlakuan yang fluktuatif. Menurut pakar Tiongkok, pemikiran Marxisme dan Xi Jinping berperan penting dalam gejolak yang terjadi di Xinjiang dan membawa kendali pada rakyat lokal dan kesamaan etnis (Xiaoci, 2018).

Populasi Islam di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tersebar pada wilayah Beijing, Ningxia, Gansu, dan Qinghai dengan etnis muslim Hui. Namun hanya di



Xinjiang, pandangan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT) membedakan wilayah ini dengan dorongan mayoritas penduduk Islam, memiliki tokoh agama yang mempunyai dan dukungan baik di luar negeri. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sistem Komunisme menjadikan Islam sebagai saingan dalam menyebarkan pengaruh pada bidang sosial, politik, ideologi, dan hukum begitupun sebaliknya. Dari pernyataan di atas terlihat bahwa terang-terangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menyebabkan konflik internal pada etnis Uyghur sehingga mereka menerima banyak kekerasan terutama kekerasan kultural.

## **2.2 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Ideologi**

Menurut Johan Galtung, pandangan ideologi dari suatu bangsa dapat bersumber dari agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat hingga dijadikan acuan dasar dalam pandangan manusia atau ketika negara memiliki hak otoritas tunggal dalam mengendalikan masyarakat (Galtung J. , 1990).

Keadaan wilayah Xinjiang dikelilingi oleh sungai, gurun, dan lembah sungai serta terletak 40.000 km dari ibu kota Beijing. Tiongkok menjadikan Xinjiang sebagai wilayah yang tidak terpisahkan dari kedaulatannya dan berbatasan langsung dengan delapan negara yang mempengaruhi keamanan nasional Tiongkok. Identitas Islam dan etnis Uyghur bangkit pasca munculnya negara- negara Asia Tengah setelah Uni Soviet terpecah sehingga memunculkan ketakutan Tiongkok terhadap Xinjiang bermula dari tindakan kelompok separtis serta mengabaikan etnis Uyghur (Bhattacharya, 2003).

Ancaman eksternal dan ancaman internal yang menimpa minoritas muslim dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan bentuk upaya pemerintah Tiongkok dalam mewujudkan konsep negara damai dan makmur yang menjadi impian Tiongkok dalam tenggat waktu 2049. Dalam upaya mencapai hal tersebut Tiongkok melaksanakan kesepakatan dagang pada jalur sutra yang melalui wilayah Xinjiang, *Belt and Road Initiative (BRI)* menjadi salah satu sumber krisis Xinjiang, *The Xinjiang Uyghur Autonomus Region (XUAR)* dengan negara Tiongkok serta ide untuk mewujudkan Impian Tiongkok bersama *Communist Party of China (CPC)* (Hayes, 2020).

Aktivitas agama di Xinjiang mengalami transisi dalam kebijakan hukum di Tiongkok. Hal ini dapat ditemukan dalam aktivitas pemerintah Tiongkok yang gencar melawan perang dari kelompok separtis, ekstremisme dan terorisme secara berkala. Pada era Xi Jinping gagasan ideologi nasional turut mengatur identitas etnis, termasuk muslim Uyghur dengan agama, pendidikan, budaya dan media (Klimeš, 2018).

Keamanan nasional Tiongkok akan terancam apabila wilayah Xinjiang berhasil meraih kemerdekaannya dengan dukungan internal etnis Uyghur dari kelompok separatisme seperti *East Turkestan Islamic Movement (ETIM)*, karena Xinjiang menjadi sumber keamanan energi bagi Tiongkok. *The Xinjiang Uyghur Autonomus Region (XUAR)* adalah wilayah perantara bagi Tiongkok dengan Timur Tengah dan Asia Tengah. Xinjiang berperan dalam stabilitas nasional Tiongkok, dimana Xinjiang dipandang sebagai sumber energi alam dan rute singgah untuk energi dari luar negeri (Cho, 2013).

Teror yang disusun oleh negara termasuk dalam aspek kekerasan negara, seperti penahanan etnis Uyghur di Xinjiang, mereka saling berkaitan dengan separatisme, ekstremisme, dan terorisme. Sebelumnya masyarakat sipil mendapatkan kerugian akibat tindakan kekerasan fisik dan psikis dari korban pemberontakan di Baren, pemboman bus di Urumqi. Berikut beberapa dimensi Tiongkok dalam aspek penahanan masal : paham akan ilmu agama, berumur 15 hingga 55 tahun, berasal dari etnis Uyghur (Finley J. S., 2019 ).

Dalam *White Paper*, yang diterbitkan Pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 tentang Progress in China's Human Rights in 2012. Pemerintah Tiongkok dan *Communist Party of China (CPC)* berupaya meningkatkan kebijakan dalam HAM. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 miliar dan 55 kelompok etnis minoritas serta permasalahan sosial masyarakatnya. Hal ini merumuskan konsep perlindungan pada etnis minoritas khususnya pada wilayah Xinjiang dan Tibet.

Berdasarkan kasus tersebut penulis dapat menemukan bahwa aspek ideologi dan aspek agama saling berkaitan dalam kasus etnis Uyghur yang mana pemerintah Tiongkok yang berkeyakinan bahwa suatu kelompok tertentu lebih baik dari kelompok lain sehingga memunculkan pengabdian yang berlebihan atau separatisme. Serta dorongan dari pemerintah Tiongkok sebagai negara kuat untuk mengontrol negara-negara lain dalam hal ini etnis Uyghur atau kelompok-kelompok lain dengan kebijakan yang agresif dengan tajuk demi menjaga keamanan nasional dengan melaksanakan tindakan penahanan pada masyarakat etnis Uyghur karena mereka saling berkaitan dengan separatisme, ekstremisme, dan

terorisme. Dengan ini, secara serempak terlihat bila pernyataan Johan Galtung mengenai ideologi dapat mengontrol ide dari nasionalisme yang diakomodasi oleh kelompok yang berhak atas kekuasaan dan memiliki hak istimewa dalam negara (Galtung J. , 1990, hal. 298).

### **2.3 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Bahasa**

Makna bahasa dari teori Johan Galtung dilihat secara lebih implisit dan renggang. Di mana, keberadaan bahasa yang mengukuhkan legitimasi dan permasalahan yang terkait dapat dibenarkan atas landasan bahasa yang dipakai untuk kelompok tertentu (Galtung J. , 1990, hal. 299).

Kondisi geografis Xinjiang dapat diartikan melalui keberagaman budaya etnis Uyghur. Muslim Uyghur merupakan kelompok dan kesatuan yang mempertahankan identitas regional mereka dengan kesamaan agama, bahasa dan budaya. Nilai-nilai bahasa sebagai simbol etnis Uyghur dengan koranik dan tulisan tradisional Arab diabaikan serta dilarang penerbitannya. Pemerintah Tiongkok melakukan asimilasi dengan mewajibkan penduduk lokal untuk belajar bahasa Tiongkok. Efek dari tindakan tersebut menyatakan bahwa kerusuhan di Xinjiang tidak lepas dari kontrol pemerintah pada agama dan bahasa (Giglio, 2004, hal. 25).

Walau dijadikan sebagai bagian dari daerah otonom. Akan tetapi Uyghur tetap mengalami diskriminasi oleh kelompok mayoritas Tiongkok. Terjadinya diskriminasi tidak terlepas dari sikap orang-orang Tiongkok yang sangat suka merendahkan kelompok dengan etnolinguistik yang berbeda. Sehingga hal ini memunculkan kebijakan bahasa untuk media di Tiongkok yang menyebabkan

penurunan jumlah domain bahasa Uyghur. Kebijakan bahasa tersebut dilakukan sejak tahun 1980-an di mana ruang media dikhususkan untuk bahasa Tiongkok. Bahkan diakhir abad ke-20 Tiongkok menstereotipkan bahwa kelompok minoritas Uyghur adalah kelompok yang terbelakang; terlambat dari pembangunan; dan merupakan kelompok yang susah untuk dipahami karena memiliki budaya yang berbeda. Stereotip ini diperparah oleh pernyataan orang-orang Tiongkok terhadap bahasa Uyghur dengan anggapan bahwa bahasa Uyghur bukan bahasa asli melainkan campuran kata asing yang diucapkan secara bersamaan (Dwyer, 2005, hal. 9-10).

Pemerintah Tiongkok menjadikan ketidakcakapan orang Uyghur dalam berbahasa mandarin sebagai senjata untuk melemahkan bahasa Uyghur di Tiongkok. Uyghur dianggap terbelakang karena penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan mayoritas penduduk Tiongkok (Tynen, 2020, hal. 306). Dengan alasan bahasa, Pemerintah Tiongkok akhirnya mempersulit Uyghur untuk terlibat dalam pekerjaan formal di Tiongkok. Padahal kenyataannya ini dilakukan Tiongkok disebabkan oleh permusuhan yang ada di Xinjiang antara Uyghur dan Han Tiongkok sehingga sektor kerah putih Xinjiang semuanya dikuasai oleh pekerja dari Han China. Sama sekali tidak ingin mempekerjakan Uyghur (Baranovitch N. , 2007, hal. 464). Sejalan dengan itu ketidakmampuan bahasa Tiongkok oleh orang-orang Uyghur menyebabkan mereka dianggap sebagai rakyat jelata di Tiongkok (Bovingdon, 2002, hal. 41).

Atas permasalahan ketertinggalan pembangunan, modernisasi dan kemakmuran Uyghur. Pemerintah Tiongkok kembali mempertegas pentingnya bahasa Mandarin bagi orang Uyghur dengan melaksanakan pendidikan bilingual di

semua wilayah Xinjiang. Kebijakan ini semakin mengancam hilangnya bahasa ibu mereka yaitu bahasa Uyghur yang akan digantikan dengan bahasa mandarin (Baranovitch N. , 2020, hal. 25). Kebijakan bahasa dalam sistem pendidikan kemudian menghapuskan sistem pendidikan paralel yang terpisah tapi setara, yang sebelumnya mengizinkan orang tua Uyghur untuk memilih media linguistik antara Uyghur dan Tiongkok dalam bahasa anak-anak mereka di sekolah. Akan tetapi hal ini berubah pada tahun 2005, semua sekolah berbahasa minoritas kemudian digantikan. Akibatnya, bahasa Tiongkok Mandarin dengan cepat dilembagakan sebagai satu-satunya media pengajaran di lembaga pendidikan menengah, tinggi dan utama di kawasan Tiongkok secara keseluruhan sesuai dengan tujuan utama pemerintah Tiongkok untuk mengakuisisi Uyghur (Finley J. S., 2015).

Bahkan jauh sebelum itu, pada kekaisaran Qing tahun 1815 dan 1857 sudah terdapat kebijakan asimilasi paksa yang melibatkan pendidikan rakyat dan birokrasi pemerintah yang hanya menggunakan teks bahasa mandarin dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan melakukan hal tersebut, Qing mengklaim akan membawa peradaban ke Uyghur secara bertahap menghilangkan institusi dan adat istiadat yang ada. Bentuk kekerasan kultural dalam bahasa tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang tidak kritis pada mayoritas Han Tiongkok yang berdampak pada meminimalkan bahkan menghancurkan budaya dan bahasa Uyghur. Sejatinya pemerintah Tiongkok menurut sejarahnya telah lama memberlakukan pendidikan satu ukuran dengan standar yang meminggirkan aspek Asia Tengah dan Timur tengah dari budaya Uyghur. Ini terjadi dengan menghapus

secara bertahap sumber daya untuk etnis minoritas yaitu pendidikan bahasa (Ryono, 2015, hal. 238).

Uyghur sebagai daerah otonom telah ada sejak 1950-an. Kebijakan ini berimplikasi pada kebebasan penggunaan bahasa minoritas serta praktik keagamaan yang toleran hingga tahun 1960-an. Akan tetapi kenyataannya kebijakan untuk hak minoritas ini merupakan bagian dari taktik Tiongkok untuk mendapatkan dukungan dari para minoritas. Dukungan ini diperuntukkan pada penguatan ekonomi dan politik Tiongkok yang kemudian secara perlahan akan menghilangkan perbedaan etnis yang ada pada masyarakat Uyghur. Salah satu penghilangan budaya dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan pendidikan dwibahasa sebagai alat tawar politik yang mudah untuk dilakukan (Reny, 2009, hal. 503). Hal ini dilihat dari adanya ketentuan pilar pendidikan yang kontradiktif dengan kebijakan dwibahasa. Pihak ini mengharuskan pendidikan menggunakan bahasa Tiongkok sebagai bahasa pengantar yang tidak boleh disangkal oleh warga mana pun (Schluessel, 2007, hal. 272 ).

Menurut penulis, dalam beberapa kasus di atas pemerintah Tiongkok telah melangsungkan kekerasan kultural dengan mendorong etnis Uyghur untuk menghilangkan kebudayaan asli mereka, bahasa (bahasa Uyghur) melalui asimilasi pendidikan bahasa Mandarin. Hal ini disertai dengan pandangan Johan Galtung bahwa bahasa digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk mendiskriminasi kelompok tertentu (Galtung J. , 1990). Kekerasan atas nama diskriminasi bahasa khususnya pendidikan pada etnis Uyghur akan merenggut nilai-nilai peradaban etnis Uyghur.

Secara keseluruhan, peradaban etnis Uyghur di Xinjiang memiliki sejarah yang rumit dan panjang, hal ini tercermin dari penetapan Xinjiang sebagai daerah otonomi dan pengaruh perbedaan identitas mereka, etnis Uyghur secara sepenuhnya dari Tiongkok dapat dilihat dari aspek budaya, ideologi, agama, dan politik. Hal tersebut menjadi implementasi berlangsungnya kekerasan kultural melalui beberapa bentuk kekerasan yakni ideologi, dan bahasa.





## **BAB III**

### **KEKERASAN KULTURAL DALAM ASPEK SENI, ILMU FORMAL DAN KOSMOLOGI SERTA ANALISIS SEGITIGA KEKERASAN TERHADAP ETNIS UYGHUR**

Pada halaman sebelumnya membahas tentang bentuk kekerasan kultural dari ideologi dan bahasa pada etnis Uyghur serta analisisnya. Lalu, pada bab ini akan fokus pada bentuk kekerasan kultural pada etnis Uyghur dengan melihat aspek seni, ilmu formal dan komologi. Kemudian, di bagian penutup menjelaskan bentuk segitiga kekerasan terhadap etnis Uyghur dan kekerasan kultural sebagai sumber utama dalam membenarkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

#### **3.1 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Seni**

Johan Galtung berpendapat bahwa setiap wilayah memiliki seni dan tradisinya masing-masing, akan tetapi seni dan tradisi yang berbeda ini dapat menjadi sumber terjadinya kekerasan kultural berupa penghinaan dengan pandangan melalui salah satu seni dan tradisi yang lain. Seni juga dapat menjadi objek kekerasan yang dapat menggambarkan subjek dalam kelompok negatif (Galtung J. , 1990).

Berikut beberapa kasus kekerasan kultural dalam aspek seni, seniman Uyghur dan karya seni yang diproduksi Uyghur tidak tercatat dalam dalam sejarah Tiongkok di masa lalu. Hal ini berkaitan dengan praktik pembatasan seni dengan menghilangkan lukisan-lukisan seniman, kerajinan tangan, sulaman, pembuatan

karpas serta kaligrafi (Makofsky, 2015, hal. 199). Pembatasan ini juga tampak pada sejarah seni musik Uyghur yang secara tradisional tidak hadir dalam siklus peradaban musik di Tiongkok. Musik Uyghur telah terisolasi dari potongan peradaban musik Tiongkok. Bahkan terus berlanjut hingga era modern dengan banyaknya pembatasan musik Uyghur dan diabaikannya musik Uyghur sebagai bagian dari musik nasional di Tiongkok (Millward, 2005, hal. 12).

Pembatasan ini berlanjut pada banyaknya sensor-sensor lagu dan lirik yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Sensor pemerintah terhadap seniman dan karya seni dari Uyghur juga dialami oleh banyak penyanyi folk asal Uyghur. Mereka yang mengeluarkan karya musik populer Uyghur tahun 1990-an harus siap diperiksa terlebih dahulu oleh pemerintah Tiongkok. Ketidakpercayaan Tiongkok pada Uyghur menjadi salah satu permasalahan besar kebebasan ekspresi penyanyi folk Uyghur pada masa itu. Jika ditemukan bait nyanyian yang tidak sesuai dengan prinsip Tiongkok maka akan dilakukan sensor, pembatasan penyebaran, bahkan ditingkat lebih parah akan dimusnahkan. Hal ini berkaitan dengan pesan yang disampaikan penyanyi *folk* Uyghur pada saat itu mengenai kritik dan kepedulian sosial pada masyarakat Uyghur. Mereka memasukkan lirik lagu dengan membangun serta mereproduksi kesadaran sosial, politik dan alternatif nasional yang harusnya tanpa diskriminasi (Clothey, 2016).

Kasus lain juga ditemukan pada salah satu penyanyi terkenal yang berasal dari Uyghur bernama Askar. Ia sempat menjadi incaran Otoritas Tiongkok karena dianggap menyuarakan keislaman dalam konsernya. Hal ini tentu menyulut amarah otoritas Tiongkok yang memiliki stereotip kepada Islam. Hingga akhirnya kejadian

yang dialami Askar menyebabkan semua penyanyi Tiongkok yang hendak melakukan konser live skala besar selalu diperiksa dan diberi peringatan terlebih dahulu. Bahkan kekerasan pada penyanyi seperti Askar tidak hanya dibatasi pada konser live melainkan meluas pada permasalahan lainnya. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pembatasan-pembatasan pada lagu-lagu dari penyanyi yang dianggap mengancam Tiongkok. Lagu mereka menjadi jarang disiarkan dalam saluran Tiongkok dan tidak pernah diputar di saluran Uyghur. Banyak lagu dari seniman Uyghur yang pada akhirnya dibatasi penyebarannya oleh otoritas Tiongkok karena dianggap mengganggu keharmonisan yang diinginkan Tiongkok (Baranovitch N. , 2007, hal. 479).

Selain pada seni lukis dan kerajinan tangan, produksi seni berupa teks lisan yang berasal dari orang-orang Uyghur juga dibatasi dengan berbagai pembatasan yang dilakukan oleh penerbit dari negara Tiongkok. Penggunaan penerbit asal negara ini ditunjukkan untuk menghindari konten yang tidak sesuai dengan ideologi Tiongkok. Berbagai sensor dan pengontrolan teks tertulis dari Uyghur dilakukan langsung dibawah kendali pers negara (Steenberg, 2021, hal. 178). Bahkan keseriusan Tiongkok terlihat pada penyensoran-penyensoran semua hasil karya seniman Uyghur dan pembatasan ekspresi artistik lainnya yang dipandang oleh Tiongkok sebagai bagian dari promosi nasionalisme Uyghur dan bertentangan dengan ideologi mereka (Roberts, 2018, hal. 237).

Posisi dan potensi seniman Uyghur di Tiongkok tidak dapat tersorot dalam budaya dan masyarakat Tiongkok. Hal ini terjadi akibat dominasi seniman yang berasal dari Han Tiongkok. Mereka mewacanakan kemerdekaan seni di Xinjiang

pada era modern dengan mengistilahkan seni yang bersifat terbuka. Akan tetapi bagi masyarakat Uyghur ini merupakan bentuk rekayasa kontemporer. Dimana selama kemajuan seni tersebut posisi seniman Uyghur selalu terdiskriminasi dengan jumlah Han Tiongkok yang menguasai dunia seni di Uyghur sedangkan para Uyghur hanya dipekerjakan sebagai pekerja budaya yang berperan dalam membantu seniman Han Tiongkok. Produk seni dan budaya yang dihasilkan oleh orang Han Tiongkok yang mengatasnamakan Uyghur menjadi sebuah penawar kekerasan struktural yang selama ini terjadi di Tiongkok. Seniman Uyghur dibungkam baik oleh pembatasan politik negara maupun dominasi Han Tiongkok. Dan sentimen Uyghur dan Han diperparah dengan adanya pandangan buruk pada seniman Uyghur yang hanya dapat bersifat terbuka pada negara barat dan negara Islam (Byler, 2018a, hal. 102 ).

Masyarakat Uyghur selama ini selalu melakukan upaya untuk menegakkan hak mereka salah satunya melalui *Uyghur American Association* (UAA) yang didirikan pada 1998 oleh sejumlah sarjana dan aktivis Uyghur di Amerika. Mereka aktif untuk mempromosikan pelestarian humanistik dan budaya Uyghur. Akan tetapi pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok tetap menjadi tantangan besar dalam pelestarian seni dan budaya Uyghur (Clarke, 2017, hal. 12). Tidak hanya itu, Uyghur sejak 1920-an telah melakukan perlawanan melalui elit intelektual dengan mengeluarkan puisi perlawanan untuk mendorong kebangsaan Uyghur, Secara efektif tradisi lisan ini memainkan pengaruh yang cukup signifikan. Akan tetapi, mengetahui hal tersebut pemerintah Tiongkok melakukan segala upaya pembatasan pada ekspresi tradisi lisan dan karya seni lainnya seperti novel sejarah,

lagu daerah, humor dan cerita rakyat. Hal ini berdampak pada pengetatan seniman yang akan tampil diacara publik seperti televisi nasional dengan pemeriksaan oleh biro kebudayaan setempat dan mengharuskan setiap penampilan seniman minoritas memasukkan lagu dengan lirik berisi pesan persatuan kebangsaan. Pesan ini berisi mempromosikan bagaimana kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas yang sangat adil (Finley J. N., 2013, hal. 175).

Hal di atas memberikan rujukan bahwa pemerintah Tiongkok memberikan pembatasan dan sensor-sensor pada lagu serta lirik yang ditulis oleh seniman Uyghur seperti masalah penyanyi Uyghur terkenal bernama Askar tidak hanya dibatasi pada konser live melainkan meluas pada permasalahan lainnya, mereka menyuarakan keislaman dalam konsernya dan bagian dari promosi nasionalisme Uyghur sehingga dianggap mengganggu keharmonisan nasional yang diinginkan pemerintah Tiongkok. Tindakan tersebut mencerminkan bila seni sebagai media kebebasan ekspresi etnis Uyghur dapat menjadi objek kekerasan kultural yang dilakukan pemerintah Tiongkok.

Pada kenyataannya konsep seni dalam semua kasus di atas menunjukkan bahwa seni dalam kekerasan kultural, dapat menjadi sumber media kekerasan yang benar adanya. Secara langsung hal ini selaras dengan argumen Johan Galtung tentang setiap wilayah memiliki seni dan tradisinya masing-masing, akan tetapi seni dan tradisi yang berbeda ini dapat menjadi sumber terjadinya kekerasan kultural berupa penghinaan dengan pandangan melalui salah satu seni dan tradisi yang lain (Galtung J. , 1990, hal. 300).

### **3.2 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Ilmu Formal**

Johan Galtung menafsirkan ilmu formal seperti ilmu matematika dengan memberikan pemahaman berpikir dalam dimensi hitam dan putih, membaginya dalam ruang personal, sosial, dan dunia. Tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat sosial dunia ini tidak sesuai dengan kebutuhan dasar untuk berkomunikasi dengan dua arah. Ilmu formal sebagai penarikan kesimpulan yang rasional, yang tidak membutuhkan hipotesis atau belum dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bersifat dugaan dari suatu aktor yang menjadi dorongan dalam pengambilan keputusan yang tentunya tidak berakhir dengan persamaan yang sama dengan tempat yang berbeda (Galtung J. , 1990, hal. 301).

Uyghur dan Islam merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Perpaduan keduanya merupakan dua sisi mata pisau. Bagi mayoritas etnis Han yang mendiami Xinjiang, mereka memandang dua entitas antara Islam dan Uyghur sebagai bagian dari pandangan negatif. Terdapat anggapan bahwa Uyghur adalah bagian dari teroris yang bertindak sebagai ekstrimis dan akan mengancam kedaulatan Tiongkok secara keseluruhan (Luqiu, 2018, hal. 613). Pandangan Han terhadap Uyghur mengenai terorisme, separatis dan fundamentalis agama sangat awet yang dibarengi oleh perbedaan mencolok lainnya berupa bahasa, agama, dan tradisi budaya. Pandangan negatif ini melanggengkan bahwa Uyghur merupakan seorang penjahat berbahaya, pencuri yang harus dihindari, serta tidak dapat dipercaya dalam lingkungan pertemanan (Chung, 2018, hal. 196).

Kehadiran pandangan negatif mengenai Uyghur sebagai bagian dari teroris tidak bisa dilepaskan dari peran media massa yang memberikan gambaran

mengenai Uyghur dan Islam dengan berita yang tidak informatif. Sehingga perbedaan mencolok dari agama yang dikaitkan dengan terorisme ini terus melekat terhadap orang-orang Uyghur (Luqiu, 2018, hal. 603). Sehingga tak heran diskriminasi terhadap Uyghur terus berlanjut disebabkan oleh atribut individu lainnya yang semakin mendukung hal tersebut. Atribut tersebut meliputi kurangnya kemampuan bahasa Tiongkok dan jaringan sosial yang lemah diantara orang Uyghur yang ditunjukkan pada etika kerja, dari sudut pandang orang Han. Hal ini membuat Uyghur semakin dianggap berada pada posisi di bawah Han Tiongkok dengan berbagai keterbelakangan dan kekurangan yang membuatnya terus terdiskriminasi (Wu, 2014, hal. 171).

Hubungan Uyghur dan Han terus berlanjut menjadi sebuah kecenderungan yang terlihat antara superior mayoritas dengan minoritas. Uyghur dianggap hina, terbelakang, dan barbar. Terdapat stereotip bagi orang Han dengan pendidikan tinggi menyebut Uyghur sebagai penjahat yang tidak tahu berterima kasih, malas, kejam, membawa pisau, mencopet, yang memperkuat kemungkinan orang Uyghur masuk sebagai bagian dari teroris. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari ada kecenderungan orang Han melihat Uyghur dengan penuh kecurigaan karena sering menganggur sehingga dianggap sebagai pencuri, pembuat onar, dan pembuat kekacauan dalam keputusan pemerintahan (Cunningham, 2012, hal. 37). Persepsi negatif ini terus diperkuat dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh Uyghur melalui ekspresi melalui ruang publik dengan mengkritik pemerintah Tiongkok secara sastra, seni, dan praktik serta wacana sehari-hari (Baranovitch N. , 2003, hal. 727).

Tionghoa Han selalu menganggap bahwa budaya orang Uyghur sebagai budaya yang agresif, kotor, licik, dan suka bertengkar (Anthony, 2011, hal. 53). Sehingga tak heran orang Uyghur diperlakukan sebagai orang luar dalam interaksi sehari-hari mereka dengan orang Han Tiongkok dalam kehidupan sehari-harinya (Tobin, 2011, hal. 23). Persepsi han Tiongkok terhadap Uyghur membuat persepsi meluas bagi negara Tiongkok terhadap Uyghur sebagai bagian dari pembuat masalah besar di Tiongkok (Clarke, 2010, hal. 228). Bahkan, stereotip yang berkembang diantara orang Uyghur dan Han tidak terbatas pada interaksi sehari-hari saja, melainkan juga masuk ke ranah politik. Uyghur yang kotor dan licik juga diperparah dengan pandangan bahwa mereka adalah bagian dari koruptor dan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh kehidupan perekonomian Uyghur yang lebih miskin dari orang Han (Baranovitch N. , 2007, hal. 487).

Uyghur dianggap sebagai etnis tanpa kapasitas yang memadai, sehingga Uyghur akan sulit untuk melakukan mobilisasi status pada tangga sosial yang lebih tinggi. Segala ketertinggalan Uyghur pada bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan sosial membuat mereka sulit untuk melakukan usaha untuk meningkatkan kapasitas mereka. Bahkan dalam pasar tenaga kerja Uyghur menjadi sangat tertinggal karena dari keseluruhan pendaftar kerja Uyghur tidak banyak yang dapat menggunakan bahasa Mandarin sebagai syarat utama pendaftar kerja formal di Tiongkok. Berbagai kekurangan pada kapasitas orang Uyghur membuat mereka selalu dianggap tertinggal dan terbelakang dari masa ke masa oleh orang Han dan Tiongkok secara keseluruhan (Hasmath, 2011, hal. 134).



Pada bagian terakhir ini yang menjadi salah satu aspek bentuk kekerasan kultural kepada etnis Uyghur hingga saat ini adalah penarikan kesimpulan yang salah. Dalam pandangan Johan Galtung Ilmu formal sebagai penarikan kesimpulan yang rasional, yang tidak membutuhkan hipotesis atau belum dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bersifat dugaan dari suatu aktor. Dalam kasus-kasus yang menimpa etnis Uyghur di Xinjiang, secara garis besar bisa disimpulkan bahwa bentuk kekerasan kultural banyak ditemukan akibat dari penarikan kesimpulan yang salah.

Pemerintah Tiongkok menganggap etnis Uyghur sebagai orang yang memiliki keterbelakangan dan kekurangan yang membuatnya terus terdiskriminasi sehingga mereka selalu menyimpulkan bahwa semua orang etnis Uyghur mendapatkan stereotip pembuat masalah besar di Tiongkok. Dengan demikian, penarikan kesimpulan yang salah dan yang tidak membutuhkan hipotesis dapat membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural menjadi tidak terlihat dan samar-samar (Galtung J. , 1990, hal. 301).

### **3.3 Kategori Kekerasan Kultural Dari Segi Aspek Kosmologi**

Contoh terakhir menjelaskan aspek kosmologi, Pada bagian ini kembali ke masalah transisi dari kekerasan budaya ke budaya kekerasan. Sebagai dicontohkan dalam bagian sebelumnya, seperti penilaian dapat dicapai dengan mengidentifikasi budaya yang luas dan beragam aspek, dalam pemikiran agama, ideologis, bahasa, seni, dan ilmu formal yang semuanya berfungsi untuk membenarkan kekerasan. Namun, ada juga yang lain pendekatan untuk mengeksplorasi akar untuk budaya yang mendalam, di antaranya mungkin ada beberapa. Dalam bagian ini akan

mencari tentang akar atau sumber dari hal tersebut, sehingga untuk menguraikan kode genetik budaya yang menghasilkan budaya elemen dan mereproduksi dirinya sendiri melalui mereka. Bahwa ini menjadi sangat spekulatif adalah tidak begitu bermasalah, itu sifatnya ilmu yang mendalikan lapisan yang lebih dalam, ejaan keluar implikasi, menguji inti substansial dari teori sekitar (Galtung J. , 1990, hal. 301).

Aspek konsep kosmologi dirancang untuk berdasarkan asumsi yang lebih dalam tentang realitas. Mendefinisikan apa yang normal dan alami. Asumsi pada tingkat kedalaman ini sadar kolektif tidak mudah digali, apalagi dicabut. Dan namun, pada tingkat inilah budaya bisa menunjukkan begitu banyak fitur kekerasan sehingga budaya mulai terlihat kejam. Pilihan, dimana ada kekuatan, kemiringan. Ada urgensinya, sekarang sindrom menghalangi lambat, membangun kesadaran dan memberlakukan terhadap perdamaian struktural dan langsung. Lalu terpecah pemikiran dikotomis dengan deduktif untuk melawan kesatuan dari sarana dan berakhir. Ada kesombongan terhadap alam melawan kesatuan kehidupan. Ada sebuah kecendrungan kuat untuk kuat untuk individualisasi dan peringkat manusia, memecah keutuhan. Dan ada yang transendental, mutlak Tuhan dengan penerus yang luar biasa. Keseluruhan budaya memiliki potensi yang luar biasa untuk diekspresikan lebih banyak memanifestasikan tingkat budaya dan kemudian digunakan untuk membenarkan yang tidak dibenarkan.

Masalahnya adalah pemikiran seperti ini mudah menyebabkan rasa putus asa. Mengubah kode genetik budaya terlihat pada paling tidak sesulit biologis kode genetik. Selain itu, bahkan jika itu mungkin – mungkin rekayasa budaya mungkin

merupakan bentuk dari kekerasan sama bermasalahnya dengan rekayasa genetika membuktikan. Haruskah dibiarkan kebetulan artinya bagi mereka yang memiliki kekuatan dan hak istimewa. Ini adalah bidang yang sangat sulit dan penting untuk penelitian perdamaian di masa depan. Johan Galtung menegaskan bahwa aspek kosmologi dapat didefinisikan secara kasar sebagai dalam asumsi budaya suatu peradaban, termasuk asumsi umum yang mendasari struktur dalam mendefinisikan yang normal dan alami (Galtung J. , 1990, hal. 296-301).

Dalam aspek kosmologi, sebuah laporan *White Paper* mengenai *Respecting and Protecting the Rights of All Ethnic Groups in Xinjiang* yang diterbitkan pada tahun 2021, Praktik pada kegiatan keagamaan dan pengetahuan agama akan dijamin oleh negara. Asosiasi Islam Tiongkok mengoperasikan situs web versi Tiongkok dan Uyghur. Setiap individu dapat mempelajari agama melalui jalur hukum. Dibawah kepemimpinan Xi Jinping dan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) menegaskan kemakmuran moderat dan sebagai negara sosialis modern. Hal ini menggambarkan stabilitas, kemakmuran dan memastikan kesetaraan etnis di Tiongkok (Xinhua, 2021).

Entitas adalah salah satu penentu utama dari ketidaksetaraan, berdasarkan hal ini, tidak ada masalah keragaman dan identitas tetapi hanya hubungan kekuasaan dan visi politik. Dalam kasus etnis Uyghur, terdapat kekurangan kelas politik Uyghur sehingga konsep identitas etnis yang hanya berdasarkan klaim persamaan hak sebagai warga negara. Kategori etnis seperti Han dan Uyghur yang merupakan warga negara yang berhak dan mempunyai kewajiban yang sama, sehingga diskriminasi bisa diterima apabila kelompok ini tidak mematuhi otoritas

pemerintah Tiongkok. Identitas etnis kemudian menjadi bagian dari kategori politik yang berguna dalam membantu Tiongkok untuk menerapkan langkah-langkah politik yang tidak populer dan represif, sedangkan untuk orang-orang Uyghur hal ini berguna dalam mengklaim dan mengikuti pola pikir yang konservatif. Kebijakan yang berdasarkan preferensi etnis memberikan manfaat bagi penduduk Uyghur sendiri dan sebagai perantara dengan pemerintah (Cappelletti, 2020, hal. 21).

Pada tahun 2014 pemerintah wilayah otonomi Qiemo di Xinjiang memberikan intensif kepada orang-orang Uyghur yang melakukan pernikahan antara kelompok etnis minoritas serta tunjangan pada pasangan yang mampu bertahan hingga 3 tahun. Langkah yang digunakan pemerintah ini sebagai upaya untuk meredakan konflik antar etnis dan serangan teror. Pernikahan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai politik Tiongkok dan kebijakan ini memiliki dampak yang tidak diharapkan, kebijakan perkawinan antar suku tersebut tidak mungkin berhasil karena hampir dalam semua aspek budaya etnis Uyghur dan Han selalu berlawanan atau berbeda (Guo, 2015, hal. 132).

Dalam kosmologi, aspek budaya yang dicontohkan Galtung dilihat dari asal mula atau akar kemunculan hal terkait. Aspek kosmologi digunakan untuk memandang hal yang lebih jauh akan kenyataan serta menentukan apa yang normal dan alami (Galtung J. , 1990, hal. 301). Jika dilihat dari penjelasan tersebut menggunakan kesetaraan pada etnis minoritas khususnya uyghur untuk klaim sesama warga negara termasuk dalam kekerasan kultural dalam aspek kosmologi.

**Tabel 1 Temuan Hasil dari Kasus Kekerasan Kultural terhadap Etnis  
Uyghur**

No.	Kasus	Kekerasan Kultural	Kategori Kekerasan Kultural
1	Identitas Etnis Uyghur	Separatis, Ekstremisme dan Terorisme	Ideologi
2	Asimilasi Pendidikan Bahasa Mandarin	Diskriminasi Kebudayaan Etnis Uyghur	Bahasa
3	Praktik Pembatasan Seni	Menghilangkan Karya Seni Yang Diproduksi Uyghur	Seni
4	Pandangan Dua Entitas Islam : Uyghur dan Han	Persepsi Negatif dan Stereotip Yang Berlawanan	Ilmu Formal
5	Kekerasan Dalam Entitas Minoritas	Kesetaraan Etnis Uyghur	Kosmologi

**Sumber: Diolah dari** (Galtung J. , 1990, hal. 298-301).

### 3.3 Bentuk Tipologi Kekerasan Terhadap Etnis Uyghur

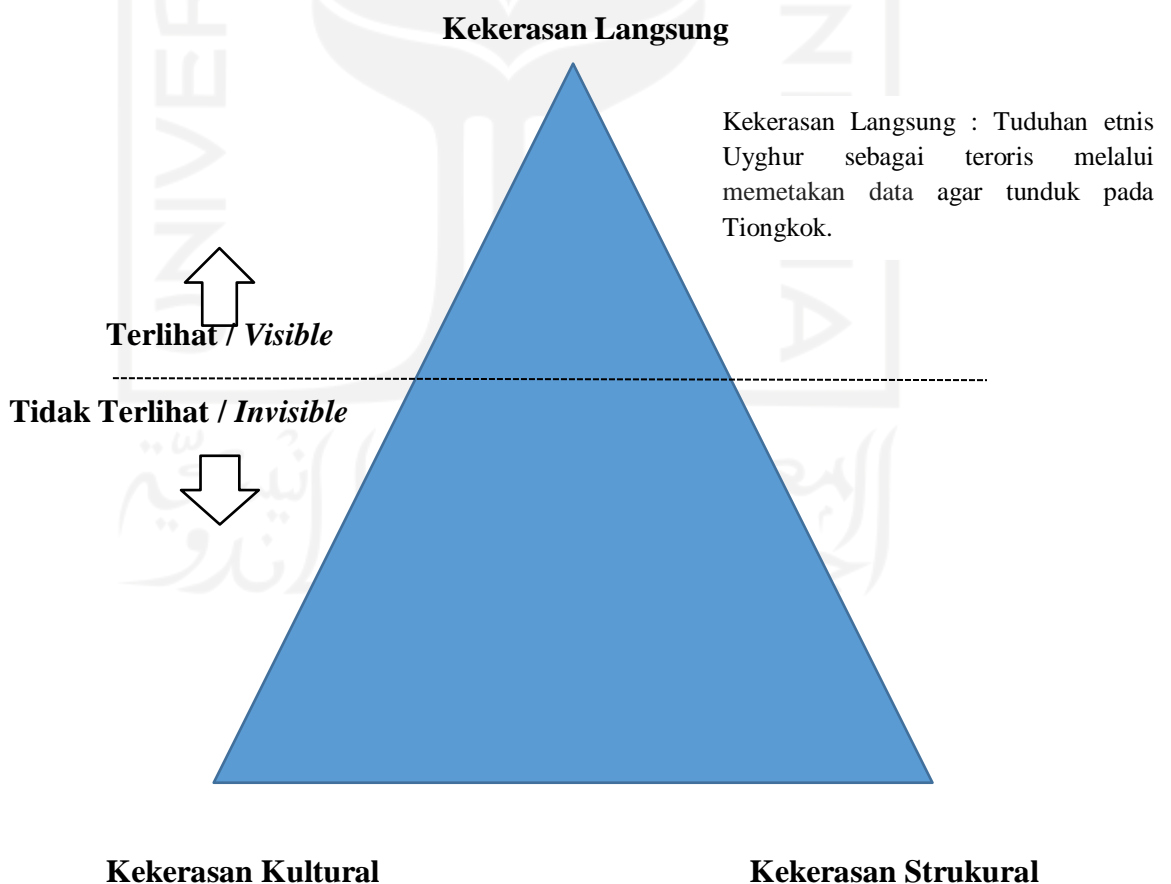
Melalui karyanya yang terbit pada tahun 1969 dengan judul "*Violence, Peace and Peace Research*," Johan Galtung menyampaikan bahwa kekerasan sebagai efek yang diterapkan pada orang-orang yang mengalami kondisi terbelakang secara fisik dan mental disambung dengan ketidakmampuan ekonomi, ideologis, dan ancaman perang. Johan Galtung, juga menjelaskan definisi kekerasan secara komprehensif dimana menekankan kepada bentuk-bentuk kekerasan yang berfokus pada kekerasan fisik dan psikologis dengan membaca subjek, tindakan, dan objek. Selanjutnya ia berfokus memecahkan kekerasan menjadi tiga jenis yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural (Galtung J. , 1969, hal. 171).

Dalam pandangan Johan Galtung yang menjelaskan bahwa kekerasan struktural dilatarbelakangi oleh mekanisme, proses, dan institusi politik dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan keamanan, reputasi, dan keamanan. Sedangkan kekerasan kultural disebabkan oleh kebencian, ketakutan dan kemarahan yang hadir dari kesalahpahaman dan ketidakpahaman salah satu pihak. Johan Galtung juga menggambarkan kekerasan struktural dan kekerasan kultural sebagai sumber konflik yang tidak terlihat sehingga dapat membentuk kekerasan langsung dan berganti menjadi kekerasan serta menjadi terlihat. Menurut kerangka ini, konflik merupakan proses variabel yang mana kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung dapat saling mempengaruhi. Dalam menafsirkan ini Johan Galtung membahas bahwa kekerasan menjadi dasar pandangannya untuk konsep perdamaian, terutama pentingnya relasi yang di bangun antara hubungan langsung,

struktural, dan kultural dengan konsep kekerasan dan perdamaian. Begitu pun dengan konsep kekerasan yang menjadi prasyarat untuk menciptakan perdamaian.

Dengan demikian, konsep kekerasan membahas tentang dua masalah dalam penggunaan kekerasan dan legitimasi penggunaan kekerasan. Sedangkan kekerasan kultural berfungsi sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan struktural dan langsung yang telah berlangsung. Johan Galtung menjelaskan tentang gambaran hubungan segitiga kekerasan dalam suatu tingkatan atau kelas kekerasan. Berikut ini penjelasan bagan mengenai kondisi etnis Uyghur dilihat dari segitiga kekerasan.

**Gambar 3.1 Segitiga Kekerasan dalam Kasus Etnis Uyghur di Tiongkok**



Kekerasan Kultural : Identitas Etnis Uyghur, Asimilasi Pendidikan Bahasa Mandarin, Praktik Pembatasan Seni dan Pandangan Dua Entitas Islam : Uyghur dan Han, Kesetaraan Etnis Uyghur

Kekerasan Struktural : Perampasan tanah untuk industri oleh pemerintah Tiongkok dan larangan orang Uyghur untuk terlibat dalam industri

**Sumber: Diolah dari Segitiga Kekerasan Galtung** (Galtung J. , 1990, hal. 294)

Kekerasan struktural melalui kasus Pemerintah Tiongkok membuat konsolidasi skala kecil di Uyghur yang menjadikan pertanian industri dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan negara. Selain itu, munculnya hasil bumi berupa batu bara, minyak, gas, dan alam lainnya yang didominasi oleh pemukiman Han. Akibatnya pemerintah mengubah tanah Uyghur menjadi sumber bahan baku untuk industrialisasi kota-kota di Tiongkok bagian Timur. Jutaan pemukiman Han dipindahkan ke wilayah tersebut untuk mendukung industri baru. Akan tetapi akibat dari hadirnya industri baru terhadap Uyghur adalah biaya hidup yang makin meroket dan semakin tingginya kesenjangan antara Han dan Uyghur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kebebasan orang Uyghur untuk bekerja di bidang industri oleh pemerintah Tiongkok. Sehingga masih banyak dari orang Uyghur yang menganggur dan miskin akibat perampasan tanah industri oleh pemerintah Tiongkok dan pemukiman Han (Byler, 2018b, hal. 191-207).

Dalam kasus kekerasan langsung dapat dilihat dari genosida atas Uyghur terjadi sebagai akibat perang rakyat melawan teroris yang diakhiri dengan insiden pemerintah Tiongkok menewaskan nyawa 59 penyerang dan 37 warga sipil. Perang



mengidentifikasi akar penyebab dugaan ancaman teroris adalah Uyghur. Sehingga pada 2014 pemerintah Tiongkok melalui militernya memetakan data terhadap orang-orang Uyghur. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan data besar-besaran dari semua orang Uyghur untuk melayani program *preventative policing* yang bertujuan untuk memprediksi orang Uyghur yang berpotensi menjadi apa yang dikategorikan negara sebagai teroris (yang cenderung menentang kekuasaan negara). Sehingga penggunaan identitas ini digunakan oleh Tiongkok sebagai alat untuk mengasimilasi orang Uyghur agar tunduk pada Tiongkok (Clarke, 2015, hal. 127-146).

Dengan demikian, sebagai kelompok minoritas di Tiongkok, etnis Uyghur memiliki perbedaan mendasar mulai dari bahasa, kepercayaan dan budaya yang berbanding terbalik dengan Pemerintah Tiongkok sehingga rentan bertikai dan berkonflik. Perbedaan identitas tersebut dapat terlihat dari adanya penerimaan kekerasan struktural dengan perampasan tanah milik etnis Uyghur oleh pemerintah untuk kepentingan industri. Akibatnya muncul kekerasan langsung yang berkaitan dengan etnis Uyghur sebagai pelaku gerakan teroris pada insiden 2014. Hal ini dikombinasikan dalam kekerasan kultural dengan upaya mengasimilasi minoritas Uyghur dalam penahanan etnis Uyghur, identitas etnis Uyghur, pendidikan bahasa mandarin, praktik pembatasan seni dan pandangan dua entitas Islam : Uyghur dan Han. Dengan ini menggambarkan bahwa kekerasan kultural menjadi akar utama pada kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sejarah mencatat bahwa upaya penegakan HAM telah berlangsung berabad-abad lalu, walaupun secara eksplisit tidak semua negara berhasil menerapkan dengan baik, hal ini bisa diukur dari banyaknya kasus HAM disetiap negara sehingga menjadikan masalah HAM lebih sering dibahas dan dibicarakan. Selanjutnya ribuan orang etnis Uyghur telah menghadapi pembatasan agama dan penganiayaan dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang Tiongkok telah menekan hak-hak mereka dan menjadi sasaran kekejaman tersebut. Hal ini terjadi karena Tiongkok berupaya untuk menghapus identitas Islam dan budaya mereka.

Uyghur adalah salah satu etnis minoritas di RRT yang bermukim di wilayah Xinjiang, dimana penduduknya berbicara dengan bahasa mereka sendiri, Turki yang telah dimodifikasi. Etnis Uyghur berada di bawah kendali pemerintah Tiongkok sejak 1949. Lalu secara historis budaya dan etnis Uyghur dekat dengan negara-negara Asia Tengah. Xinjiang adalah provinsi yang memiliki pemerintahan dan daerah otonomi sendiri, mereka berada dalam pengawasan ketat otoritas pemerintahan Tiongkok seperti halnya orang Tibet. Xinjiang berbatasan dengan delapan negara Mongolia, Rusia, India, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan.

Kelompok minoritas di Tiongkok, etnis Uyghur memiliki perbedaan mendasar mulai dari kepercayaan, ideologi, bahasa, dan budaya yang berbanding

terbalik dengan Pemerintah Tiongkok sehingga rentan bertikai dan berkonflik. Perbedaan identitas tersebut dapat terlihat dari adanya penerimaan kekerasan struktural dengan perampasan tanah milik etnis Uyghur oleh pemerintah untuk kepentingan industri. Akibatnya muncul kekerasan langsung yang berkaitan dengan etnis Uyghur sebagai pelaku gerakan teroris pada insiden 2014.

Konsep kekerasan kultural dari Johan Galtung dipakai dalam kasus penelitian ini. Kekerasan sebagai efek yang diterapkan pada orang-orang yang mengalami kondisi terbelakang secara fisik dan mental disambung dengan ketidakmampuan ekonomi, ideologis, dan ancaman perang. Secara komprehensif kekerasan menekankan kepada bentuk-bentuk kekerasan yang berfokus pada kekerasan fisik dan psikologis dengan membaca subjek, tindakan, dan objek. Sedangkan kekerasan kultural disebabkan oleh kebencian, ketakutan, dan kemarahan yang hadir dari kesalahpahaman dan ketidakpahaman salah satu pihak. Selanjutnya kekerasan struktural dan kekerasan kultural sebagai sumber konflik yang tidak terlihat sehingga dapat membentuk kekerasan langsung dan berganti kekerasan serta menjadi terlihat.

Penulis menemukan jawaban terkait pertanyaan penelitian bagaimana penerapan konsep kekerasan kultural dalam kebijakan Tiongkok pada tahun 2014-2021 terhadap etnis Uyghur. Johan Galtung memberikan enam daftar aspek dalam kategori kekerasan kultural antara lain agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu formal dan kosmologi. Namun kasus etnis Uyghur hanya memenuhi lima aspek yang digunakan aktor untuk melegitimasi kekerasan kultural.

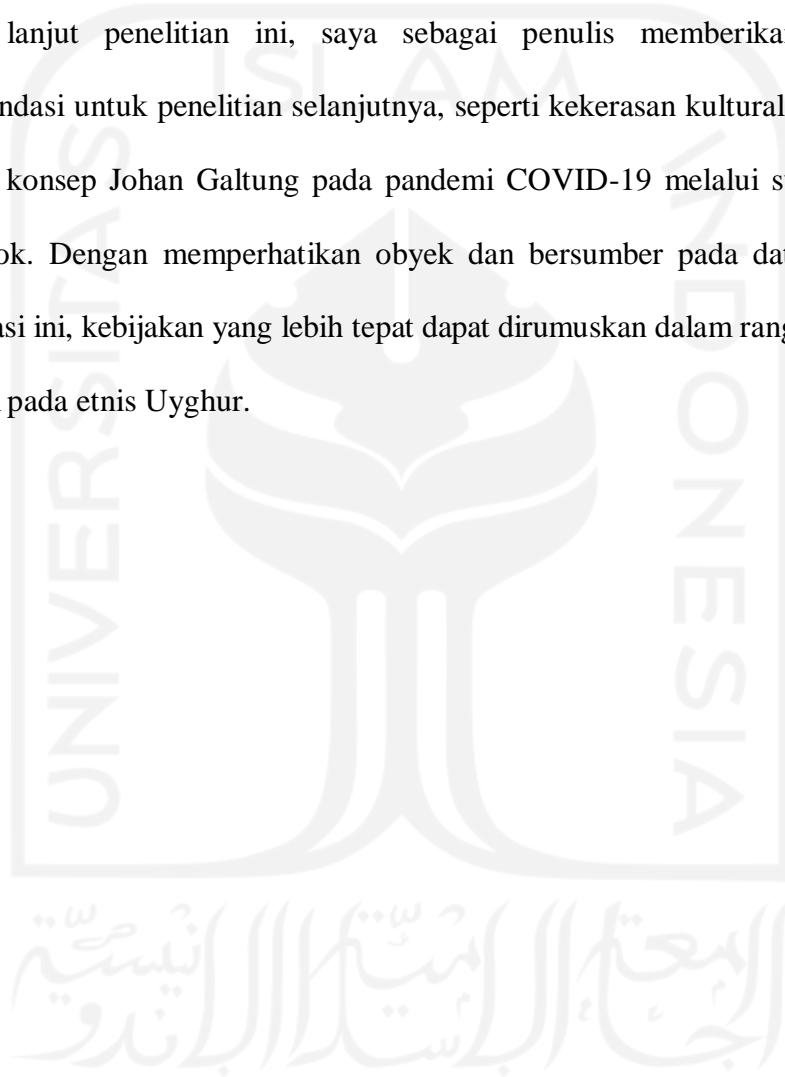
Pertama, dalam aspek ideologi dimana etnis Uyghur dikategorikan sebagai separtis, ekstremisme dan terorisme. Kedua dalam aspek bahasa, diskriminasi kebudayaan etnis Uyghur dengan menjalankan asimilasi pendidikan bahasa mandarin. Ketiga dalam aspek seni upaya menghilangkan karya seni yang diproduksi oleh etnis Uyghur. Selanjutnya aspek ilmu formal dimana persepsi negatif dan stereotip yang berlawanan dalam aspek ilmu formal seperti pandangan dua entitas Islam, Uyghur dan Han. Kemudian bentuk kekerasan yang terakhir adalah kosmologi melalui kesetaraan etnis Uyghur.

Berdasarkan penjelasan diatas, konsep kekerasan kultural dari Johan Galtung dengan menggunakan lima aspek sesuai untuk menjelaskan isu etnis Uyghur dilihat dari sudut pandang Tiongkok. Dari tipologi segitiga Galtung, kekerasan struktural dilihat dari tindakan perampasan tanah untuk industri oleh pemerintah Tiongkok dan larangan orang Uyghur untuk terlibat dalam industri, kekerasan langsung melalui tuduhan etnis Uyghur sebagai teroris melalui memetakan data agar tunduk pada Tiongkok. Kekerasan kultural berupa penahanan etnis Uyghur, identitas etnis Uyghur, asimilasi pendidikan bahasa Mandarin, praktik pembatasan seni dan pandangan dua entitas Islam : Uyghur dan Han serta kesetaraan etnis Uyghur. Rangkaian dinamika konflik dari kekerasan kultural di atas memberikan satu pola dimana, kekerasan kultural sebagai akar dari terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung.

#### **4.2 Rekomendasi**

Dalam kesimpulan diatas, penelitian ini secara spesifik hanya menjelaskan kebijakan Tiongkok dalam aspek kekerasan kultural terhadap etnis Uyghur pada

tahun 2014-2021. Dengan demikian penelitian ini hanya membahas dari sudut pandang Tiongkok dengan konsep kekerasan kultural dari Johan Galtung dan dibatasi pada periode 2014 hingga 2021 saja. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan yang belum dibahas dan dianalisis, sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, saya sebagai penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, seperti kekerasan kultural etnis Uyghur dengan konsep Johan Galtung pada pandemi COVID-19 melalui sudut pandang Tiongkok. Dengan memperhatikan obyek dan bersumber pada data yang lebih bervariasi ini, kebijakan yang lebih tepat dapat dirumuskan dalam rangka kekerasan kultural pada etnis Uyghur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. S. (2015). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baranovitch, N. (2007). *Inverted exile: Uyghur writers and artists in Beijing and the political implications of their work*. *Modern China*.
- Baranovitch, N. (2020). The “Bilingual Education” policy in Xinjiang revisited: New evidence of open resistance and active support among the Uyghur elite. *Modern China*, 25.
- Bequelin, N. (2019, Decembe 18). *Mesut Ozil’s Uyghur post: 10 things you need to know about China’s Xinjiang crisis*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/ozils-uyghur-post10-things-you-need-to-know-about-chinas-xinjiang-crisis/>
- Beydoun, K. A. (2018, September `15). *Situasi Mengerikan Muslim Uighur China: Bencana Kemanusiaan yang Diabaikan Dunia*. Retrieved from Mata Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/situasi-mengerikan-muslim-uighur-china-bencana-kemanusiaan-yang-diabaikan-dunia/>
- Bhattacharya, A. (2003). Conceptualising Uyghur separatism in chinese nationalism. *Strategic Analysis*.
- Bovingdon, G. (2002). The not-so-silent majority: Uyghur resistance to Han rule in Xinjiang. *Modern China*, 41.
- Byler, D. (2018). *Spirit breaking: Uyghur dispossession, culture work and terror capitalism in a Chinese global city*. *Doctoral dissertation*.
- Castets, R. (2003). The Uyghurs in Xinjiang–The Malaise Grows. After September 11th 2001, the Chinese regime strove to include its repression of Uyghur opposition within the international dynamic of the struggle against Islamic terrorist networks. *China Perspectives*, 3.

- Ceswara, D. F., & Puji, W. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila. *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal*, 5.
- Cho, J. S. (2013). Rethinking Beijing's geostrategic sensibilities to Tibet and Xinjiang: Images and interests. *Pacific Focus*.
- Clarke, M. (2017). The Impact of Ethnic Minorities on China's Foreign Policy: The Case of Xinjiang and the Uyghur. *China Report*.
- Clothey, R. A. (2016). A voice for the voiceless: online social activism in Uyghur language blogs and state control of the Internet in China. *Information, Communication & Society*.
- Denyer, S. (2018). *Former inmates of China's Muslim 'reeducation' camps tell of brainwashing, torture*. Beijing: The Washington Post.
- Dwyer, A. M. (2005). The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity. *Language Policy, and Political Discourse*, 9-10.
- Finley, J. N. (2013). *The art of symbolic resistance: Uyghur identities and Uyghur-Han relations in contemporary Xinjiang*. Brill.
- Finley, J. S. (2015). Language, Education and Uyghur Identity in Urban Xinjiang. *Routledge*.
- Finley, J. S. (2019 ). Securitization, insecurity and conflict in contemporary Xinjiang: has PRC counter-terrorism evolved into state terror? *Central Asian Survey*.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of peace research*.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*.
- Giglio, D. (2004). Separatism And The War On Terror In China's Xinjiang Uighur Autonomous Region. *Peace Operations Training Center*, 25.
- Han, E. (2010). Boundaries, Discrimination, and Interethnic. *International Journal of Conflict and Violence*, 255.

- Hayes, A. (2020). Interwoven 'Destinies': The Significance of Xinjiang to the China Dream, the Belt and Road Initiative, and the Xi Jinping Legacy. *Journal of Contemporary China*.
- Holder, R. (2020). On the interrelatedness of human rights, culture and religion: considering the significance of cultural rights in protecting the religious identity of China's Uyghur minority. *The International Journal of Human Rights*.
- Hoshur, S. (2017). *China: New guidelines on Uyghur 'signs of extremism' issued to Xinjiang authorities*. Radio Free Asia.
- Hoshur, S. (2018). *Tens of Thousands of Xinjiang's Kuchar County Residents Held in Political 'Re-Education Camps'*. Washington, D.C: Radio Free Asia.
- Human Rights Watch. (2019, July 10). *UN: Unprecedented Joint Call for China to End Xinjiang Abuses*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/07/10/un-unprecedented-joint-call-china-end-xinjiang-abuses>
- Jafarynejad, I. (2009). Economic Incentives Preempt Independence Movements: A Case Study of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in China. *Topical Research Digest : Human Rights In China*, 86.
- Jing, Y. (2106). *Tibet, Xinjiang, and China's Strong State Complex*. New York: <https://thediplomat.com/2016/07/tibet-xinjiang-and-chinas-strong-state-complex/>.
- Kan, C. P. (2017). Uighur Foreign Fighters : An Underexamined Jihadist Challenge. *The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague*, 3.
- Kirby, J. (2018, November 6). *China's brutal crackdown on the Uighur Muslim minority, explained*. Retrieved from Vox: <https://www.vox.com/2018/8/15/17684226/uighur-china-camps-united-nations>



- Klimeš, O. (2018). Advancing “Ethnic Unity” and “De-Extremization”: Ideational Governance in Xinjiang under “New Circumstances” (2012–2017). *Journal of Chinese Political Science*.
- Lee, R. (2014). *Unrest in Xinjiang, Uyghur*. Qatar: Al Jazeera Center for Studies.
- Mahmut, D. (2019). Controlling Religious Knowledge and Education for Countering Religious Extremism: Case Study of the Uyghur Muslims in China. In *FIRE: Forum for International Research in Education (Vol. 5, No. 1, pp. 22-43)*, 24.
- Makofsky, D. (2015). Cultural Crisis and Cultural Change in the Central Asian Muslim World: Looking at Social Change through the Lens of Art. *Sociology and Anthropology*.
- Millward, J. A. (2007). *Eurasian crossroads: a history of Xinjiang*. New York: Columbia University Press.
- Millward, J. A. (2005). Uyghur art music and the ambiguities of Chinese silk roadism in Xinjiang. *The Silk Road Journal*.
- Mousseau, D. Y. (2019). Introducing the Human Rights Violations Dataset for the Kurdish Conflict in Turkey, 1990–2018. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 1.
- Osborne, S. (2018, December 18). *Chinese 're-education camps' for Uighur Muslims run like 'concentration camps', says Amnesty*. Retrieved from The Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-muslims-re-education-camps-amnesty-uighur-religion-human-rights-watch-a8678156.html>
- Reny, M. E. (2009). The political salience of language and religion: patterns of ethnic mobilization among Uyghurs in Xinjiang and Sikhs in Punjab. *Ethnic and racial studies*, 503.

- Roberts, S. R. (2018). The biopolitics of China's "war on terror" and the exclusion of the Uyghurs. *Critical Asian Studies*.
- Rodríguez, P. A. (2013). Violent Resistance In Xinjiang (China): Tracking Militancy, Ethnic Riots And 'Knifewielding' (1978-2012). *Historia Actual Online*, 143.
- Ryono, A. &. (2015). Xinjiang under China: reflections on the multiple dimensions of the 2009 Urumqi uprising. *Asian Ethnicity*.
- Schluessel, E. T. (2007). 'Bilingual'education and discontent in Xinjiang. *Central Asian Survey*.
- Shchukin, V. (2009). Uighurs in Xinjiang: A General Assessment of the Roots of Unrest. *Topical Research Digest : Human Rights In China*, 179.
- Stenberg, R. (2021). Uyghur customs: the genesis, popularity, productivity and demise of a modern Uyghur topos. *Asian Ethnicity*.
- Tynen, S. (2020). Dispossession and displacement of migrant workers: the impact of state terror and economic development on Uyghurs in urban Xinjiang. *Central Asian Survey*, 306.
- Xiaoci, D. (2018, 5 27). *Global Times* . Retrieved from <https://www.globaltimes.cn/content/1104350.shtml>